



**PENGADILAN NEGERI DUMAI
KELAS IA**

REVIU KE-3 (TIGA) RENCANA STRATEGIS 2020-2024



"SAKTI"

Sederhana-Akuntabel-Kredibel-Transparan-Inovatif

**Jl. Raya Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan
Dumai Selatan, Kota Dumai Provinsi Riau
Kode Pos ; 28825
Telp : (0765)31030
Fax : (0765)31076
E-mail : pn.dumai@gmail.com
Website : <http://pn-dumai.go.id>**

KATA PENGANTAR

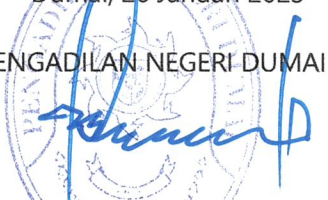
Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Ke-3 (tiga) Rencana Strategis 2020-2024.

Rencana strategis 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Penyusunan rencana strategis merupakan kewajiban setiap Satuan Kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Bab V Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Pedoman Rencana Strategis dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Reviu Ke-3 (tiga) Rencana Strategis ini. Kami berharap Reviu Ke-3 (tiga) Rencana Strategis ini bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Dumai, 26 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA, 

EFENDI, S.H.

NIP. 1968126 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1. KONDISI UMUM..... 1

2. HASIL CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PERIODE SEBELUMNYA (2015-2019).....4

3. POTENSI DAN PERMASALAHAN..... 8

 A. KEKUATAN (*STRENGTH*) 8

 B. KELEMAHAN (*WEAKNESS*)..... 9

 C. PELUANG (*OPPORTUNITY*)..... 9

 D. TANTANGAN ATAU ANCAMAN (*THREAT*)10

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....12

1. VISI 12

2. MISI..... 12

3. TUJUAN STRATEGIS.....12

4. SASARAN STRATEGIS.....13

5. POHON KINERJA.....16

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....20

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....20

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA.....26

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....27

1. TARGET KINERJA.....27

2. KERANGKA PENDANAAN.....28

BAB V. PENUTUP.....30

LAMPIRAN :

1. SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2020-2024

2. SURAT KEPUTUSAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN/ATAU PEREVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2020-2024

BAB I. PENDAHULUAN

1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Dumai dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PR.07.02-80 tanggal 23 Mei 1980 atas usulan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 717/PT/UM/1980 tanggal 05 Februari 1980 dan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/Pemb/0287/80 tanggal 25 Maret 1980 perihal pembentukan Pengadilan Negeri Dumai.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 15/DjU/SK/Tjb/XI/2008 tanggal 27 November 2008, Pengadilan Negeri Dumai dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB. Selanjutnya pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Dumai dinaikkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas IA berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas pada Empat Puluh Enam Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Kelas IB dan Tujuh Belas Pengadilan Negeri Kelas IB menjadi Kelas IA.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terletak di Kota Dumai Provinsi Riau dan berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu :

1. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
2. Dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.
4. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
5. Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki fungsi sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
3. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Dumai

yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.

4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Mediator**, sebelum memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008).
6. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh kesekretariatan.
7. **Fungsi lainnya :**
 - a. Menyelenggarakan sistem informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

Pada saat awal pembentukan, Pengadilan Negeri Dumai memiliki wilayah yurisdiksi sebagai berikut :

1. Kota Administratif Dumai
2. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yaitu :
 - a. Kecamatan Mandau
 - b. Kecamatan Bukit Kapur
 - c. Kecamatan Rupat
 - d. Kecamatan Bangko
 - e. Kecamatan Kubu
 - f. Kecamatan Tanah Putih

Seiring dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Pengadilan Negeri Pelalawan, maka wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Dumai berubah menjadi :

1. Kotamadya Dumai
2. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yaitu :

- a. Kecamatan Mandau
- b. Kecamatan Pinggir

Saat ini, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki wilayah yurisdiksi di Kota Dumai yang terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan dan terbagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Dumai Kota, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Laksamana
 - b. Kelurahan Rimba Sekampung
 - c. Kelurahan Bintan
 - d. Kelurahan Dumai Kota
 - e. Kelurahan Sukajadi
2. Kecamatan Dumai Selatan, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bukit Timah
 - b. Kelurahan Mekar Sari
 - c. Kelurahan Bumi Ayu
 - d. Kelurahan Ratu Sima
 - e. Kelurahan Bukit Datuk
3. Kecamatan Dumai Barat, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bagan Keladi
 - b. Kelurahan Pangkalan Sesai
 - c. Kelurahan Purnama
 - d. Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan
4. Kecamatan Dumai Timur, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bukit Batrem
 - b. Kelurahan Buluh Kasap
 - c. Kelurahan Jaya Mukti
 - d. Kelurahan Tanjung Palas
 - e. Kelurahan Teluk Binjai
5. Kecamatan Bukit Kapur, terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bagan Besar
 - b. Kelurahan Bukit Kayu Kapur
 - c. Kelurahan Bukit Nenas
 - d. Kelurahan Gurun Panjang
 - e. Kelurahan Kampung Baru
 - f. Bagan Besar Timur
 - g. Bukit Kapur
6. Kecamatan Medang Kampai, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Guntung
 - b. Kelurahan Mundam
 - c. Kelurahan Teluk Makmur
 - d. Kelurahan Pelintung

7. Kecamatan Sungai Sembilan, terdiri dari 6 (enam) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bangsal Aceh
 - b. Kelurahan Basilam Baru
 - c. Kelurahan Batu Teritip
 - d. Kelurahan Lubuk Gaung
 - e. Kelurahan Tanjung Penyembal
 - f. Sungai Geniot

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dituntut untuk dapat melaksanakannya dengan baik dan terencana secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Perencanaan strategis diperlukan dalam pelaksanaan proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

2. HASIL CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PERIODE SEBELUMNYA (2015-2019)

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis 2015-2019 melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Nomor W4.U6/0006/UM.10.10/II/2014 Tanggal 5 Februari 2014. Sepanjang periode tersebut, Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku melalui penetapan reviu sebagai berikut :

NO.	REVIU	SURAT KEPUTUSAN	
		NOMOR	TANGGAL
1.	I	-	26 Januari 2016
2.	II	W4.U6/2647/OT.01.1/XII/2017	22 Desember 2017
3.	III	W4.U6/137/OT.01.1/I/2018	17 Januari 2018
4.	IV	W4.U6/468/OT.01.1/II/2019	6 Februari 2019
5.	V	W4.U6/10a/OT.01.1/I/2020	2 Januari 2020

Tabel 1.1. Penetapan Reviu Rencana Strategis 2015-2019

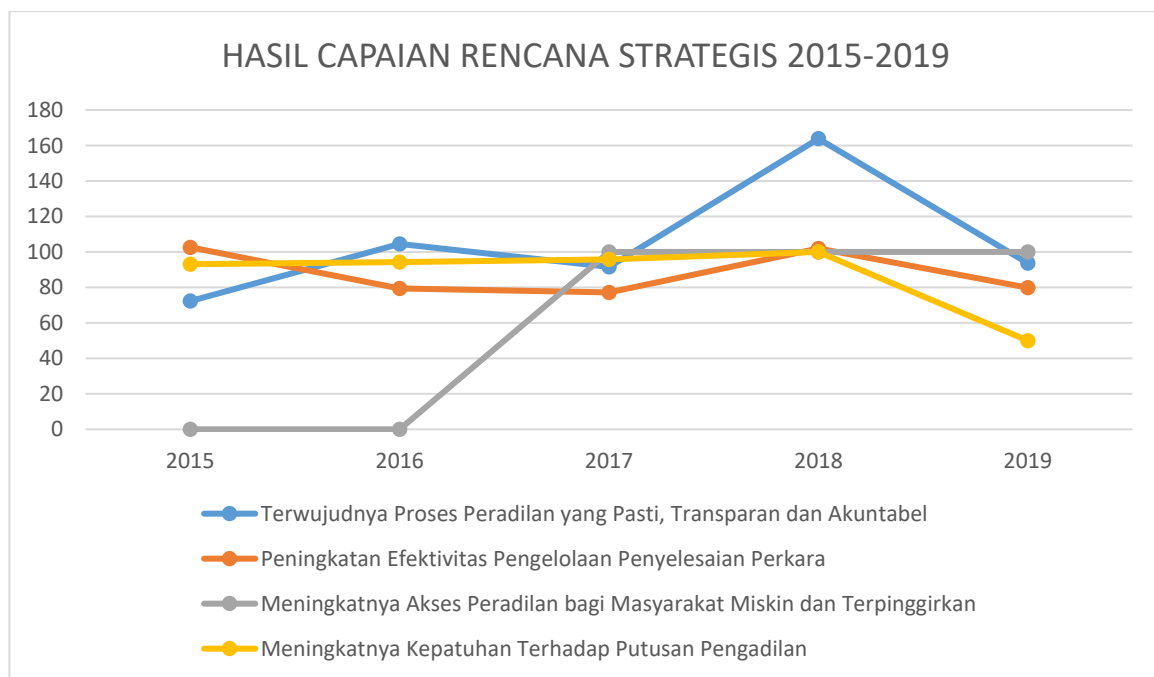
Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA telah berhasil melaksanakan Rencana Strategis 2015-2019 hingga akhir periode dengan hasil capaian sebagai berikut :

HASIL CAPAIAN RENCANA STRATEGIS 2015-2019																	
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					REALISASI (%)					CAPAIAN (%)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	100	95	95	95	83	76,32	77,75	100	85	85	76,32	81,63	105,26	89,47	102,71
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100	95	95	95	95	98,87	98,91	100	98,85	99,91	98,87	104,12	105,26	104,05	105,17
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	100	97	96	95	95	96,48	92,49	99,58	99,28	99,3	96,48	95,36	103,72	104,51	104,53
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	100	97	96	95	95	98,43	95,13	99,62	99,7	99,59	98,43	98,07	103,77	104,95	104,83
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.	100	97	96	95	95	98,43	95,13	99,62	99,7	99,81	98,43	98,07	103,77	104,95	105,06

HASIL CAPAIAN RENCANA STRATEGIS 2015-2019																	
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					REALISASI (%)					CAPAIAN (%)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	3	4	5	5	5	0	10,53	0	33,33	0	0	263,16	0	666,67	0
		i. Index kepuasan pencari keadilan.	80	80	80	80	81	0	0	79,6	80,01	98,27	0	0	99,5	100,01	121,32
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I											74,28	104,49	91,52	163,85	93,74	
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.		3	3	3	3	3	3,5	0	0	3,57	0	116,67	0	0	119,05	0	
d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.		100	100	100	100	100	96,43	96,67	85,94	91,03	99,24	96,43	96,67	85,94	91,03	99,24	
e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

HASIL CAPAIAN RENCANA STRATEGIS 2015-2019																	
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					REALISASI (%)					CAPAIAN (%)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.															
		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS II											102,62	79,33	77,19	102,02	79,85
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS III											0	0	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100	100	100	100	100	93,1	94,29	95,83	100	50	93,1	94,29	95,83	100	50
		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS IV											93,1	94,29	95,83	100	50

Tabel 1.2. Hasil Capaian Rencana Strategis 2015-2019



Gambar 1.1. Hasil Capaian Rencana Strategis 2015-2019

Hasil capaian Rencana Strategis 2015-2019 dapat menggambarkan keberhasilan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam melaksanakan perencanaan strategis yang telah disusun dan menjadi upaya konsistensi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. KEKUATAN (*STRENGTH*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mencakup hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan atau perundang-undangan sebagai berikut :

1. Berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di Kota Dumai.
2. Dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di Kota Dumai apabila diminta.
3. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi terukur dan akuntabel.
4. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan internal yang sudah berjalan baik.
5. Memiliki *Whistleblowing System* melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung yang ditujukan untuk publik dan internal lembaga sehingga dapat menjadi alat kontrol terhadap pelanggaran kode etik.
6. Memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan dan indeks persepsi korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA melalui aplikasi Si Super.
7. Keikutsertaan dalam akreditasi penjaminan mutu pengadilan dan zona integritas untuk mendukung terciptanya sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparaturnya yang bersih dan bebas

dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

8. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang mendukung peningkatan kinerja.

B. KELEMAHAN (*WEAKNESS*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA hanya memiliki 2 (dua) ruang sidang selain ruang sidang anak, sehingga proses persidangan baik secara online yang didukung penggunaan teknologi informasi maupun offline atau konvensional belum optimal.
- Inovasi yang berbasis teknologi informasi yang memberikan layanan kepada masyarakat dan pencari keadilan terkait proses dan jenis-jenis layanan di Pengadilan belum terpenuhi.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Jumlah sumber daya manusia aparaturnya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang tersedia saat ini belum sesuai dengan volume, kapasitas, dan kemampuan kerja yang dibutuhkan serta belum memenuhi standar Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA.
- Masih terdapat adanya jabatan struktural dan fungsional yang masih kosong/lowong.
- Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA belum memiliki aparaturnya yang mampu melayani masyarakat atau pencari keadilan yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA belum tersertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Bangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA belum sesuai standar bangunan gedung Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA.
- Fasilitas untuk penyandang disabilitas belum terpenuhi dengan baik.
- Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA belum memenuhi kebutuhan dan rencana yang diajukan, sehingga masih banyak sarana dan prasarana yang belum terpenuhi.

C. PELUANG (*OPPORTUNITY*)

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- *Website* resmi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat digunakan sebagai wadah publikasi yang memuat informasi terkait seputar kegiatan dan produk hukum.

- Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkara yang sedang diproses dan yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
 - Implementasi persidangan secara elektronik dapat mempermudah proses dan waktu penyelesaian perkara.
 - Layanan bantuan hukum dapat menjadi wadah bantuan bagi masyarakat dan pencari keadilan yang tidak mampu secara financial.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pemberian tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA maupun Mahkamah Agung dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparaturnya.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Pengawasan dan pembinaan internal yang dilaksanakan secara berkala sebagai media monitoring dan evaluasi terhadap kinerja.
 - Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, atau Lembaga pengawasan eksternal lainnya menjadi sarana perbaikan untuk kemajuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Sinergitas dan koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum di Kota Dumai menjadi dukungan untuk terwujudnya penegakan hukum dan keadilan.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

D. TANTANGAN ATAU ANCAMAN (*THREAT*)

Tantangan atau ancaman yang dihadapi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Minimnya prasarana persidangan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil belum seluruhnya menguasai teknologi informasi.
 - Jumlah personil aparaturnya yang terbatas dan posisi yang kosong/lowong menyebabkan terjadinya rangkap jabatan dan meningkatkan beban kerja.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol dan memotivasi kinerja aparaturnya.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang terbatas belum dapat memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Visi yang menjadi cita-cita Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang Agung”

Melalui visi tersebut, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA diharapkan mampu mewujudkan supremasi hukum dan mendapat kepercayaan publik dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, efektif, efisien yang didasari sikap independen.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mewujudkan visi, maka Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mempunyai misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

3. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA didukung dengan indikator sebagai berikut :

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
		g. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
		h. Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.
		i. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		j. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.
		k. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
		l. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.	a. Pembinaan aparatur pengadilan. b. Pengawasan kinerja aparatur pengadilan. c. Transparansi pengelolaan keuangan dan aset.

Tabel 2.1. Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Penyusunan sasaran strategis memberikan arah yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dan disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2020 hingga tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dan diubah melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pad Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 2.2. Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA merupakan arahan dalam mewujudkan visi dan misi berdasarkan indikator kinerja utama yang telah direviu dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Indikator kinerja utama ini diperlukan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Sasaran strategis tersebut didukung dengan kegiatan dan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dengan rincian kertas kerja sebagai berikut :

PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG
1. Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Koordinasi	Percepatan Penyelesaian Perkara	Dukungan Penyelesaian Perkara	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
		2. Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Pidana yang Diselesaikan	1. Pendaftaran Berkas Perkara 2. Penetapan Hari Sidang 3. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan 4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG
				5. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa 6. Minutasi/Upaya Hukum 7. Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama 8. Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	
		3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Pos Bantuan Hukum	Pos Bantuan Hukum	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
2. Dukungan Manajemen	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1. Layanan Umum	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel
			2. Layanan Perkantoran	1. Gaji dan Tunjangan 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 3. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Layanan Sarana Internal	1. Pengadaan Kendaraan Bermotor 2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 3. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
			2. Layanan Prasarana Internal	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 2.3. Rincian Kertas Kerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

5. POHON KINERJA

Pohon kinerja merupakan alat bantu bagi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk mengawal struktur logis sebab-akibat dan sinergitas atas berbagai kondisi yang diperlukan dalam menghasilkan *outcome* yang diharapkan. Skema penyusunan pohon kinerja adalah dengan mencari atau menentukan akar permasalahan dan kemudian diselesaikan secara kolektif oleh seluruh unit kerja terkait dimulai dari level unit kerja yang lebih tinggi ke level unit kerja yang lebih rendah. Pohon kinerja diharapkan dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi untuk mencapai target kinerja.

Pohon kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai berikut :

POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

STRATEGIC	KETUA	VISI	Terwujudnya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang Agung											
		TUJUAN	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA						Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA					
		SASARAN	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel						Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara		Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan		Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	
		INDIKATOR	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

TACTICAL	ADMINISTRATOR (ESELON III)	PROGRAM	Penegakan dan Pelayanan Hukum						Dukungan Manajemen Pengadilan					
		SASARAN	1. Terlaksananya koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan penyelesaian perkara 2. Terlaksananya pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara 3. Terlaksananya administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi kepaniteraan 4. Terlaksananya persidangan perkara						1. Terlaksananya pengelolaan perencanaan, program dan anggaran 2. Terlaksananya pengelolaan kepegawaian 3. Terlaksananya penataan organisasi dan tata laksana 4. Terlaksananya pengelolaan keuangan 5. Terlaksananya pengelolaan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan 6. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi dan statistik 7. Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan					
		INDIKATOR	1. Jumlah pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis 2. Jumlah pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara 3. Jumlah pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutas, evaluasi dan administrasi kepaniteraan 4. Jumlah pelaksanaan persidangan perkara						1. Jumlah pengelolaan perencanaan, program dan anggaran 2. Jumlah pengelolaan kepegawaian 3. Jumlah penataan organisasi dan tata laksana 4. Jumlah pengelolaan keuangan 5. Jumlah pengelolaan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan 6. Jumlah pengelolaan teknologi informasi dan statistik 7. Jumlah pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan					

OPERASIONAL	PENGAWAS (ESELON IV)	KEGIATAN	Penyelenggaraan dukungan dan pengelolaan administrasi perkara, kepaniteraan, kejurusitaan, dan persidangan			Penyelenggaraan dukungan dan pengelolaan administrasi perkantoran, perencanaan, teknologi informasi, pelaporan, sarana dan prasarana, asset, keuangan, organisasi dan tata laksana, serta kepegawaian		
		SASARAN	1. Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana 2. Terlaksananya registrasi perkara pidana 3. Terlaksananya distribusi perkara pidana yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 4. Terlaksananya pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan penangguhan penahanan 5. Terlaksananya pengiriman berkas upaya hukum perkara 6. Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara pidana yang sudah diputus dan diminutasi 7. Terlaksananya penyimpanan berkas perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap 8. Terlaksananya penyerahan berkas perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap 1. Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata 2. Terlaksananya registrasi perkara perdata 3. Terlaksananya distribusi perkara perdata yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 4. Terlaksananya pengiriman berkas upaya hukum perkara 5. Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara pidana yang sudah diputus dan diminutasi 6. Terlaksananya penyimpanan berkas perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap 7. Terlaksananya penyerahan berkas perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum 1. Terlaksananya pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara 2. Terlaksananya penyajian statistik perkara 3. Terlaksananya penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara 4. Terlaksananya penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara 5. Terlaksananya penyiapan, pengelolaan, dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara 6. Terlaksananya penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat 1. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran 2. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan 3. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik 1. Terlaksananya pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan 2. Terlaksananya pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan 3. Terlaksananya pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat 4. Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan 1. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian 2. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana					

			ke Panitera Muda Hukum					
		INDIKATOR	1. Jumlah pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana 2. Jumlah registrasi perkara pidana 3. Jumlah distribusi perkara pidana yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 4. Jumlah pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan penangguhan penahanan 5. Jumlah pengiriman berkas upaya hukum perkara 6. Jumlah penerimaan kembali berkas perkara pidana yang sudah diputus dan diminutasi 7. Jumlah penyimpanan berkas perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap 8. Jumlah penyerahan berkas perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum	1. Jumlah pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata 2. Jumlah registrasi perkara perdata 3. Jumlah distribusi perkara perdata yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 4. Jumlah pengiriman berkas upaya hukum perkara 5. Jumlah penerimaan kembali berkas perkara pidana yang sudah diputus dan diminutasi 6. Jumlah penyimpanan berkas perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap 7. Jumlah penyerahan berkas perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum	1. Jumlah pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara 2. Jumlah penyajian statistik perkara 3. Jumlah penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara 4. Jumlah penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara 5. Jumlah penyiapan, pengelolaan, dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara 6. Jumlah penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat	1. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran 2. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan 3. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik	1. Jumlah pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan 2. Jumlah pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan 3. Jumlah pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat 4. Jumlah pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan	1. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian 2. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana

Tabel 2.4. Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah. Arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum. Terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung. Beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan.

2. Proses Berperkara yang Sederhana, Murah, dan Biaya Ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh lebih 25 (dua lima) hari.

Disamping itu, Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di depan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

3. Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pelayanan Sidang Terpadu

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Pelaksanaan sidang di luar negeri terselenggara atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011. Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran.

4. *Restorative Justice*

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa. Saat ini *restorative justice* pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Poin penting Peraturan Mahkamah Agung tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesungguhnya diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu.

Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana

dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan disepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung, Kemenko Bidang Polhukam, Polri, Kemenkominfo, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.
2. Pembatasan perkara kasasi.
3. Proses ber perkara yang sederhana dan murah.
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum).
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum.
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar.
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
8. Hak uji materiil.
9. Penguatan lembaga eksekusi.
10. Keberlanjutan e-Court.
11. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).

12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
15. Peningkatan transparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset.

Arah kebijakan dan strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik.

Dengan semakin maraknya penyebaran Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi e-Court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e-Litigation.

Aplikasi e-Court merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi ecourt pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah

pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut :

- a. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
 - b. Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
 - c. Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
 - d. Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.
3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil di lingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online.

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis e-learning.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan in class training dengan e-learning yang kita kenal dengan nama blended learning. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis e-learning.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis e-learning, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket

komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis e-learning, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

4. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelekasanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan Sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

5. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui Zoom Meeting sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah-langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena

kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi zoom meeting ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya yang menjadi tunggakan pada tahun berikutnya.
2. Menyelesaikan perkara secara tepat waktu.
3. Menerima pengajuan upaya hukum perkara.
4. Melaksanakan proses diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak.
5. Melakukan peningkatan pelayanan untuk mencapai kepuasan masyarakat.
6. Melakukan pengiriman salinan putusan perkara kepada para pihak secara tepat waktu.
7. Melaksanakan proses mediasi dalam penyelesaian perkara perdata.
8. Melakukan pengiriman berkas upaya hukum perkara secara lengkap dan tepat waktu.
9. Memberikan akses informasi perkara kepada masyarakat.
10. Memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui pos bantuan hukum.
11. Menindaklanjuti permohonan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. TARGET KINERJA

Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mendukung tercapainya Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 Mahkamah Agung. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan setiap Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA telah menetapkan target terhadap indikator kinerja dalam mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2020 hingga 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	86%	86%	90%	91%	92%	Panitera
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	1%	5%	5%	Panitera
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	86%	86%	90%	91%	92%	Panitera
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	92%	92%	93%	93%	94%	Panitera
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi.	5%	5%	5%	5%	5%	Panitera
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	81%	81%	85%	86%	87%	Panitera

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	Panitera
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3%	3%	3%	3%	3%	Panitera
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-	Panitera
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-	-	-	Panitera
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100%	100%	90%	90%	90%	Panitera
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	10%	10%	10%	Panitera

Tabel 4.1. Target Kinerja

2. KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, baik melalui dukungan dan prasarana yang memadai, regulasi, dan sumber pendanaan yang cukup. Kerangka pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO.	AKTIVITAS PROGRAM	KERANGKA PENDANAAN (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pembinaan administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	6.779.380.000,-	6.765.720.000,-	7.201.800.000,-	6.938.373.000,-	8.745.850.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan	25.000.000,-	65.000.000,-	250.500.000,-	435.681.000,-	57.987.430.000,-

NO.	AKTIVITAS PROGRAM	KERANGKA PENDANAAN (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	prasarana di lingkungan Mahkamah Agung					
3.	Peningkatan manajemen peradilan umum.	221.130.000,-	219.230.000,-	220.730.000,-	220.730.000,-	350.000.000,-

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan

BAB V. PENUTUP

Rencana strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang, tantangan, program, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana stretegis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Reviu Ke-3 (tiga) Rencana strategis 2020-2024 ini diharapkan menjadi pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

LAMPIRAN I

**SURAT KEPUTUSAN
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN/ATAU
PEREVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024**



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

NOMOR 18a TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN DAN/ATAU PEREVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI,

- Menimbang : 1. Bahwa adanya personil tim yang mutasi atau pindah tugas;
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan reviu terhadap Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berdasarkan capaian kinerja tahun 2021 sesuai laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2021;
3. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun dan/atau Pereviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG TIM PENYUSUN DAN/ATAU PEREVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA.

- Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Nomor 80 Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Tim Penyusun dan/atau Pereviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terhitung sejak keputusan ini ditetapkan;
- Kedua : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun dan/atau Pereviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA;
- Ketiga : Menugaskan tim dimaksud untuk melakukan penyusunan dan/atau reviu terhadap Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan sesuai peraturan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima : Salinan keputusan ini disampaikan kepada mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Dumai

Pada Tanggal : 6 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA, *Y*



EFENDI, S.H.

NIP. 19681026 199603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

TIM PENYUSUN DAN/ATAU PEREVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1.	EFENDI, S.H. NIP. 19681026 199603 1 001	Ketua	Penanggungjawab
2.	MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H., M.H. NIP. 19700123 199903 2 002	Wakil Ketua	Ketua
3.	AGUS SUKMANA, S.H., M.H. NIP. 19660611 198703 1 001	Panitera	Koordinator Administrasi Teknis Peradilan
4.	ADE JUNAEDY, S.T. NIP. 19760603 200604 1 005	Sekretaris	Koordinator Administrasi Non Teknis Peradilan
5.	DEDY TIAS DIANTO, S.H. NIP. 19711210 199303 1 005	Panitera Muda Pidana	Anggota Administrasi Teknis Peradilan
6.	FRANSISKA MANURUNG NIP. 19630126 198803 2 001	Plt. Panitera Muda Perdata	Anggota Administrasi Teknis Peradilan
7.	SARYO FERNANDO, S.H. NIP. 19800527 200805 1 001	Panitera Muda Hukum	Anggota Administrasi Teknis Peradilan
8.	IBRAHIM MAKMUR, S.T. NIP. 19850713 200912 1 005	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Anggota Administrasi Non Teknis Peradilan
9.	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H. NIP. 19851207200904 2 004	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota Administrasi Non Teknis Peradilan
10.	RISA RESTU SARI, S.T. NIP. 19851207200904 2 004	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota Administrasi Non Teknis Peradilan

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA, 

EFENDI, S.H.
NIP. 19681026 199603 1 001

LAMPIRAN II

**SURAT KEPUTUSAN
REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024**



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
NOMOR 32 TAHUN 2023**

**TENTANG
REVIU KE-3 (TIGA) RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

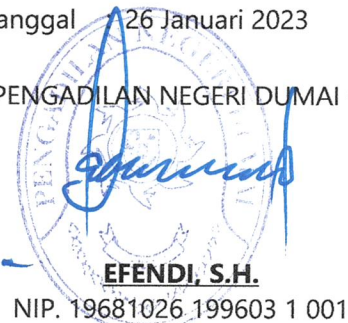
- Menimbang : 1. Bahwa telah ditetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2022;
2. Bahwa untuk mewujudkan cetak biru (*blue print*) pembaharuan peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan
3. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Reviu Ke-3 (tiga) Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG REVIU KE-3 (TIGA) RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA.
- Pertama : Reviu Ke-3 (tiga) Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk tahun 2020-2024.
- Kedua : Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memuat visi, misi, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, indikator kinerja, dan rencana aksi yang disusun berdasarkan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 26 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA, 



EFENDI, S.H.

NIP. 19681026 199603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.